KOCENIN JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
E-ISSN: 2807-3444, Volume: 5, Nomor: 2 (2025)

PENDAMPINGAN PARTISIPATIF INTEGRASI WISATA CAGAR BUDAYA DI SUB-KAWASAN PASAR IKAN, KOTA TUA JAKARTA

Teungku Nelly Fatmawati[1)*], **Inavonna**[2)] , **Amar Fikri Sanubari**[3)], **Kasya Nasika Puspitahidayat**[4)]

,

[1,2,3,4)] Program Studi Arsitektur, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Trisakti, Jakarta Barat

Corresponding Author : teungku.nelly@trisakti.ac.id

Diterima :2 November 2025	*Revisi:10 November 2025*	*Disetujui: 10 November 2025*	*Terbit online:Desember 2025*

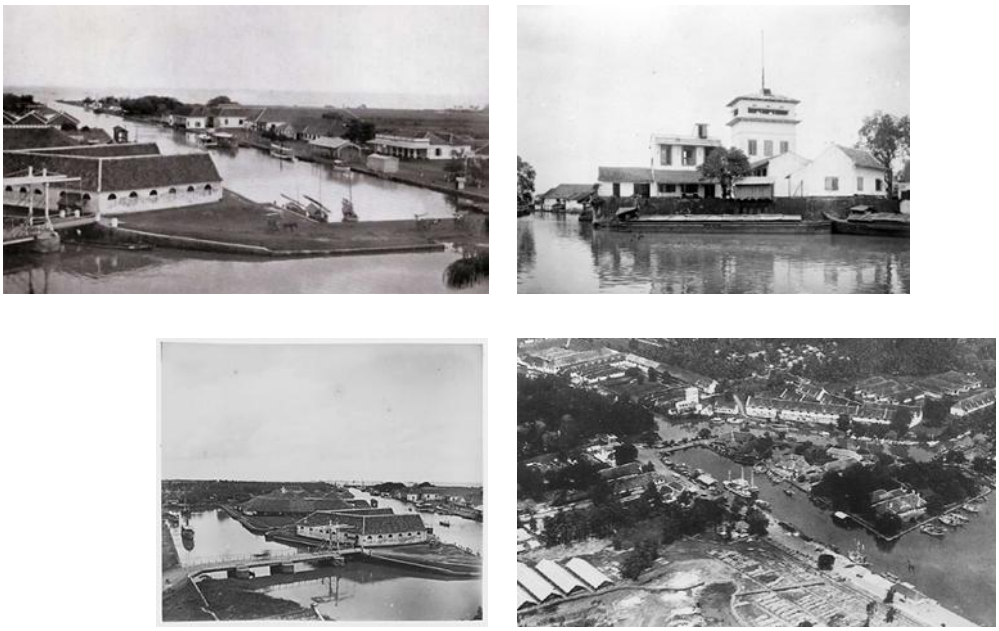
ABSTRAK

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dilatarbelakangi kondisi Sub-Kawasan Pasar Ikan, Kota Tua Jakarta yang bernilai sejarah tinggi namun menghadapi tekanan urbanisasi, kerusakan fisik bangunan bersejarah, dan alih fungsi lahan yang tidak terkontrol. Ketiadaan delineasi resmi memperlemah kepastian perlindungan dan tata kelola; koordinasi antarlembaga, akademisi, dan komunitas kerap tidak optimal akibat tumpang tindih kewenangan dan minimnya ruang dialog. Di sisi lain, komunitas pesisir penghuni turun-temurun masih memiliki kesadaran pelestarian yang beragam serta memandang sebagian kebijakan sebagai ancaman ruang hidup. Menjawab isu tersebut, PKM ini merancang pendampingan partisipatif untuk sosialisasi delineasi sebagai "bahasa bersama" integrasi wisata cagar budaya. Peta delineasi disusun dari penelusuran peta historis dan verifikasi kondisi aktual, lalu diseminasi melalui pemetaan pemangku kepentingan, penyusunan materi, sesi sosialisasi dan diskusi dengan mitra awal (Museum Bahari / Menara Syahbandar), dan perumusan tindak lanjut. Indikator keberhasilan mencakup peningkatan pemahaman tentang peran delineasi, teridentifikasinya kebutuhan lintas-situs (narasi kawasan, rute terpadu, titik aktivasi), dan komitmen mitra untuk mengonsolidasikan pengelola situs sekitar. Luaran meliputi materi sosialisasi siap pakai, booklet, serta peta wisata. Temuan menunjukkan sosialisasi delineasi yang terstruktur efektif sebagai pemicu kolaborasi awal dan batu loncatan menuju tata kelola rute terpadu. Rekomendasi meliputi perluasan pendampingan ke situs sekitar, serta pembentukan forum rutin dengan pemangku kepentingan dan masyarakat setempat.

Kata Kunci: *Deliniasi Wisata, Cagar Budaya, Partisipatif, Kota Tua Jakarta, Pasar Ikan*

1 PENDAHULUAN

Kota Tua Jakarta merupakan lanskap bersejarah yang membentuk identitas kota dan memori kolektif warganya. Di dalam Sub-Kawasan Pasar Ikan, terdapat jejak maritim Batavia sejak abad ke-17, mulai dari aktivitas Pelabuhan, niaga, hingga jaringan permukiman pesisir, yang terekam pada situs-situs cagar budaya, seperti Pelabuhan Sunda Kelapa, Menara Syahbandar, Museum Bahari, Masjid Luar Batang, Pasar Heksagon, Tempat Pelelangan Ikan (TPI), dan Kampung Akuarium (lihat Gambar 1 dan 2).



Gambar 1. (a) Pelabuhan Sunda Kelapa tahun 1870, (b) Menara Syahbandar dari Pasar Ikan tahun 1926; (c) Pasar Ikan dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) tahun 1860 – 1872; (d) Pasar Heksagon
Sumber : Wardhana, Arya (2021).



Gambar 2. (a) Museum Bahari tempo dulu sebagai Gudang Logistik Tentara Jepang tahun 1942 – 1945; (b) Museum Bahari saat ini
Sumber : mitramuseumjakarta.id, diakses pada Maret 2025 dan Wardhana, Arya (2021).

Pada tahun 1905, pemerintah Hindia Belanda mendirikan Visscherij Station di kawasan Pasar Ikan sebagai bagian dari upaya awal kolonial untuk mengembangkan penelitian kelautan. Lokasinya sangat strategis, yang berada di tepi muara Ciliwung, dekat pusat logistik Batavia, dan memiliki akses langsung ke laut. Pada tahun 1922, fasilitas ini berkembang menjadi Laboratorium voor het Zee-onderzoek (LOZ) dengan struktur bangunan permanen dan kelengkapan laboratorium modern pada masanya. Arsitektur gedung LOZ mengadopsi bentuk bangunan utilitarian Eropa—berlantai satu, berdinding bata tebal, berlangit-langit tinggi untuk sirkulasi udara tropis, dan memiliki tangki-tangki akuarium besar sebagai bagian dari riset serta edukasi publik. Laboratorium ini kemudian terbuka untuk kunjungan umum, dan menjadi salah satu tempat edukasi populer bagi warga Batavia dan pendatang. Dari sinilah nama “Kampung Akuarium” kelak melekat dalam memori warga. Selain itu, Banyak pelajar dan wisatawan berkunjung ke sini untuk menikmati pemandangan Kota Tua dan mempelajari sejarah pelayaran Nusantara, menjadikannya salah satu destinasi wisata edukatif unggulan di Jakarta.



Gambar 3. Visscherij Station (Gedung Laboratorium Perikanan (A) Tahun 1905, (B) Tahun 1922, Dan (C) Gedung Akuarium Tahun 1923
Sumber : Pangkerego, G. E. V. (2023)

Sayangnya, nilai historis tersebut kini berhadapan dengan tekanan kontemporer berupa percepatan urbanisasi, degradasi fisik bangunan pusaka, dan alih fungsi lahan yang tidak terkendali. Di sisi sosial, komunitas pesisir—banyak di antaranya penghuni turun-temurun, dan pernah mengalami fase penggusuran pada 2016. Fenomena tersebut sekaligus memperlihatkan ketangguhan kolektif melalui pengorganisasian warga dan praktik pengelolaan berbasis komunitas, yang diwujudkan dalam pembangunan Kampung Susun Akuarium. Kawasan ini menjadi simbol kolaborasi warga dan ruang kolektif yang menyimpan nilai sosial, budaya, serta identitas maritim Jakarta.

Dalam jangka panjang, kawasan ini diharapkan dapat menjadi contoh kawasan cagar budaya berbasis komunitas yang bukan hanya mempertahankan memori sejarah, tetapi juga adaptif terhadap kebutuhan

masa depan. Meski demikian, ketiadaan delineasi resmi masih menjadi hambatan utama, setidaknya tujuh objek potensial wisata sejarah dan budaya, kini masih berjalan sendiri-sendiri, narasi kawasan belum terajut, dan jejaring alur wisatawan antar situs belum saling terkoneksi.

Secara normatif, UU No. 11/2010 (Republik Indonesia, 2010 tentang Cagar Budaya menegaskan tiga pilar pengelolaan kawasan, yaitu perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan, namun implementasi di tapak sangat dipengaruhi kejelasan batas dan tata kelola pada skala kawasan). Sejalan dengan itu, Rekomendasi Historic Urban Landscape (HUL) menekankan integrasi dimensi spasial, sosial – ekonomi - budaya melalui proses partisipatif lintas pemangku kepentingan agar kebijakan berdaya laksana dan legal secara sosial (UNESCO, 2011). Dalam pembentukan kawasan wisata warisan cagar budaya, ketika narasi historis, penataan ruang, dan alur kunjungan tidak sinkron, maka kualitas pengalaman, nilai edukasi, dan multiplier ekonomi lokal dapat menurun; sebaliknya, integrasi lintas-situs dan kurasi rute yang runtut meningkatkan lama tinggal dan belanja lokal (Ashworth & Tunbridge, 2000; Timothy & Boyd, 2003). Pada ranah aksesibilitas, prinsip keterhubungan pejalan dan jejaring rute yang ringkas, jelas perlu ditarik ke skala kawasan agar setiap situs tidak “indah sendirian,” melainkan saling menguatkan dalam satu storyline terpandu.

Berangkat dari konteks tersebut, delineasi diposisikan bukan semata produk kartografis, melainkan “bahasa bersama”, untuk menyatukan pemahaman batas, struktur, konektivitas, dan titik aktivasi lintas-situs. Dalam PKM ini, peta delineasi disusun melalui telaah peta historis dan verifikasi kondisi aktual, kemudian disosialisasikan melalui pemetaan pemangku kepentingan, penyusunan materi, serta sesi sosialisasi–diskusi dengan mitra awal (Museum Bahari/Menara Syahbandar), diakhiri perumusan tindak lanjut. Produk komunikasi publik seperti *booklet* wisata edukatif dan peta jelajah digunakan sebagai medium literasi kawasan yang menghubungkan jangkar maritim (Sunda Kelapa, Museum Bahari, Menara Syahbandar), religius (Masjid Luar Batang), ekonomi (TPI, Pasar Heksagon), dan komunitas (Kampung Akuarium).

Dengan demikian, latar belakang PKM ini menegaskan urgensi sosialisasi delineasi sebagai fondasi integrasi wisata sejarah-budaya di Sub-Kawasan Pasar Ikan: (1) memperkuat tata kelola berbasis rujukan bersama; (2) menata pengalaman pengunjung lewat narasi lintas-situs dan konektivitas pejalan yang konsisten; serta (3) memberdayakan komunitas melalui ruang dialog partisipatif dan peluang ekonomi lokal yang adil. Pendekatan ini sejalan dengan SDG 11 (kota berkelanjutan), serta diharapkan dapat menjadi model replikasi pendampingan untuk kawasan heritage lain di Indonesia.

2 STUDI PUSTAKA

Pelestarian kawasan bersejarah di kota menuntut pandangan lanskap yang secara komprehensif mengikat warisan benda (bangunan, struktur, ruang publik) dan nilai tak benda (memori kolektif, tradisi lisan, seni pertunjukkan, ritual, pengetahuan dan keterampilan yang diwariskan dari generasi ke generasi). Pendekatan Historic Urban Landscape (HUL) menegaskan bahwa pelestarian kawasan harus mengintegrasikan dimensi spasial, sosial, ekonomi, dan budaya melalui proses partisipatif lintas-pemangku kepentingan, sehingga keputusan konservasi tidak berhenti pada objek tunggal, melainkan menyangkut pola ruang, jejaring aktivitas, dan keberlanjutan penghidupan warga (UNESCO, 2011; Bandarin & van Oers, 2012).

Dalam konteks ini, delineasi kawasan tidak dipahami hanya sebagai produk kartografis, tetapi sebagai "bahasa bersama" untuk menyepakati batas, struktur ruang, hirarki elemen kunci, serta urutan prioritas penanganan. Peta delineasi sebagai jalur wisata yang disusun dari telaah historis dan verifikasi kondisi aktual menjadi alat dan media untuk menyamakan istilah teknis, meminimalkan tumpang tindih kewenangan, dan memandu perumusan program lintas-situs yang realistis, guna meningkatkan keterbacaan warisan budaya (Jokilehto, 2011; Labadi, 2013; UNESCO, 2011). Sejalan dengan arah kebijakan daerah, pernyataan resmi Pemprov DKI bahwa koridor Masjid Luar Batang – Sunda Kelapa – Kampung Akuarium – Kota Tua diarahkan menjadi satu kesatuan kawasan wisata budaya sejarah terpadu (heritage tourism) (Kompas.com, 2019).

Dalam praktik *heritage tourism*, mutu pengalaman pengunjung sangat ditentukan oleh koherensi narasi Kawasan dan alur kunjungan pada skala distrik, bukan hanya pada tiap situs masing-masing (Ashworth & Tunbridge, 2000; Timothy & Boyd, 2003). Integrasi ini mensyaraktkan perlunya aksesibilitas pejalan kaki dan konektivitas antar situs yang jelas, aman, serta aktif (Gehl, 2010; Dovey & Pafka, 2020). Proses penyusunan booklet dan peta wisata partisipatif juga memperkuat legitimasi sosial sekaligus akurasi pengetahuan lokal, sejalan dengan prinsip HUL untuk menjahit pengetahuan teknis dan pengalaman warga (UNESCO, 2011; Bandarin & van Oers, 2012). Hasilnya adalah terbentuknya deliniasi wisata terpadu, disertai jalur wisata yang merupakan hasil interpretasi dan kesepakatan dengan pemangku kepentingan, termasuk Masyarakat setempat dan langsung dapat dioperasionalkan oleh pengelola situs maupun pelaku usaha lokal.

3 PEMBAHASAN

Pembahasan pada bagian ini adalah hasil evaluasi evektifitas pendampingan partisipatif dan sosialisasi delineasi dalam mengintegrasikan tujuh objek di Sub-Kawasan Cagar Budaya Pasar Ikan, Menara Syahbandar, Museum Bahari, Pelabuhan Sunda Kelapa, Masjid Luar Batang, Kampung Akuarium, Pasar Heksagon, dan TPI, menjadi satu kesatuan kawasan wisata cagar budaya yang terpadu. Permasalahan awal yang diidentifikasi adalah pengelolaan per objek yang berjalan terpisah, narasi kawasan yang belum konsisten, serta konektivitas rute pejalan kaki yang belum memadai. Menjawab hal tersebut, peta delineasi disusun sebagai rujukan spasial bersama untuk batas kawasan, struktur ruang, dan elemen kunci Kawasan. Pendekatan ini sejalan dengan kerangka Historic Urban Landscape (HUL) yang menempatkan peta/batas sebagai instrumen mediasi tata kelola lintas-aktor (UNESCO, 2011; Bandarin & van Oers, 2012).

Rangka kerja operasional dilaksanakan bertahap selama 6 bulan, dimulai dari tahapan persiapan (survei, pengumpulan data awal (isu dan situs-situs bersejarah), serta penyuluhan pendampingan, berupa lokakarya dan Focus Group Discussion (FGD), mengenai deliniasi jalur wisata, sosialisasi lintas actor / situs, uji coba peta wisata, dilanjutkan dengan tahapan monitoring dan evaluasi, serta pelaporan akhir dan penyusunan peta deliniasi wisata & booklet jelajah pusaka.

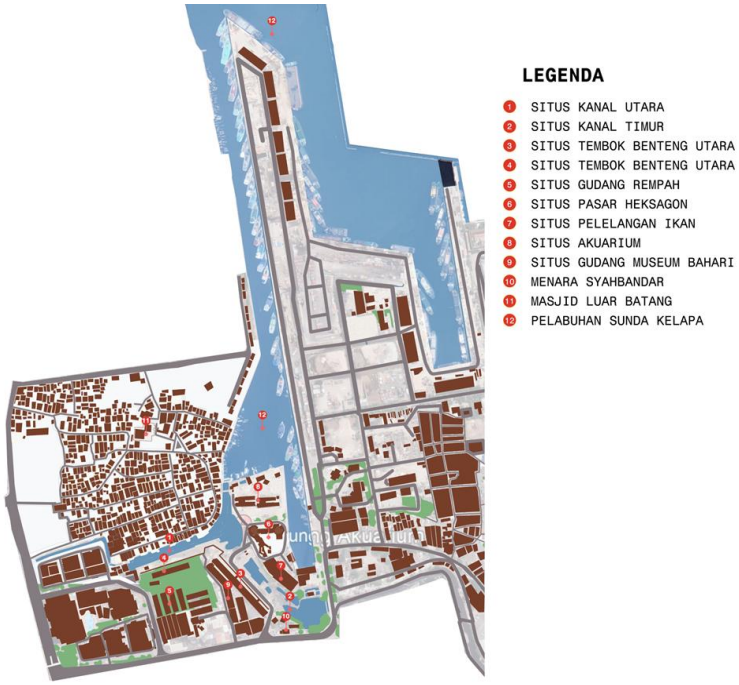


Gambar 4. Survey Lapangan Tim PKM

Tahap persiapan dilaksanakan sejak dini guna memastikan kejelasan mandat dan peran mitra. Penandatanganan kesediaan Museum Kebaharian Jakarta (Museum Bahari) sebagai mitra PKM dilakukan pada 6 Desember 2024, disusul koordinasi internal lintas program studi (Arsitektur–FTSP, MICE–FEB, dan mahasiswa Arsitektur) , serta Survey Lapangan pada Mei 2024 (Gambar 4), untuk merumuskan program, materi, dan metode pelaksanaan. Materi sosialisasi difokuskan pada hasil penelitian delineasi sub-

kawasan, urgensi integrasi lintas-situs, serta rencana operasional instrumen interpretasi dan navigasi (booklet dan peta wisata).

Pendekatan ini menempatkan delineasi bukan sekadar produk kartografis, melainkan "bahasa bersama" yang menyamakan persepsi dan meminimalkan tumpang tindih kewenangan (UNESCO, 2011; Bandarin & van Oers, 2012). Identifikasi awal diusulkan oleh tim PKM dengan menetapkan situs-situs bersejarah di kawasan tersebut. Terdapat 11 situs yang potensial, yaitu situs Kanal Utara, Kanal Timur, Tembok Benteng Utara, Gudang Rempah, Pasar Heksagon, TPI, Akuarium, Gudang Museum Bahari, Menara Syahbandar, Masjid Luar Batang dan Pelabuhan Sunda Kelapa. Situs-situs ini menjadi batasan atau acuan pembentukan deliniasi peta wisata.



Gambar 5. Situs-Situs Bersejarah di Kawasan Cagar Budaya Pasar Ikan Jakarta yang diusulkan pada Tahap Pelaksanaan Pendampingan dengan pengelola museum Bahari Pasar ikan Jakarta.

Pelaksanaan pendampingan dalam bentuk *Focus Group Discussion* (FGD) dilakukan 13 Juni 2025 melalui lokakarya luring di Museum Bahari (Gambar 6), dihadiri pimpinan dan staf pengelola. Sesi dimulai dengan diskusi prolog untuk mengaitkan latar belakang sosialisasi delineasi dengan kebutuhan pengelolaan kawasan, diikuti presentasi hasil identifikasi awal penelitian dan tanya jawab. Hasil langsung pertemuan menunjukkan penerimaan terhadap gagasan integrasi dan komitmen pengelola Museum Bahari untuk menghimpun pengelola situs sekitar (Pelabuhan Sunda Kelapa, Pasar Heksagon, Masjid Luar Batang) ke forum koordinasi berikutnya. Secara kebijakan, arah ini sejalan dengan visi daerah mengenai integrasi lintas-situs

Masjid Luar Batang - Sunda Kelapa - Kampung Akuarium - Kota Tua sebagai satu kawasan wisata budaya sejarah (Kompas.com, 2019).



Gambar 6. Presentasi dan FGD dengan Pengelola Museum Bahari Pasar Ikan

Setelah FGD, tahapan monitoring dan evaluasi partisipatif menghasilkan tiga kesepahaman kunci. Pertama, perlunya sosialisasi berkesinambungan agar seluruh pengelola/stakeholder menggunakan peta delineasi sebagai rujukan yang sama. Kedua, pentingnya mekanisme koordinasi reguler (rapat berkala dan kanal komunikasi terpadu) guna menjamin kesinambungan tindak lanjut lintas-situs. Ketiga, teridentifikasi permasalahan pemanfaatan yang belum seragam, meliputi prioritas penggunaan ruang, alur kunjungan, dan keterkaitan program, yang akan diperdalam pada siklus pendampingan berikut. Dampak/manfaat awal yang teramati ialah meningkatnya *sense of belonging* dan kesiapan berkolaborasi pada pengelola Museum Bahari terhadap agenda integrasi kawasan, serta munculnya kesadaran bahwa pengelolaan bersama merupakan prasyarat untuk mengoptimalkan kinerja wisata sub-kawasan

Pembentukan integrasi kawasan diawali dengan menyepakati situs-situs bersejarah yang diterjemahkan menjadi pola / rute wisata yang berbentuk *looping*, untuk memperkaya pengalaman wisatawan. Rute dimulai dari / ke: (1) Kota Tua , menuju ke (2) Menara Syahbandar; (3) Museum Bahari; (4) TPI; (5) Pasar Heksagon; (6) Kampung Akuarium; (7) Masjid Luar Batang, dengan opsi perpanjangan ke Pelabuhan Sunda Kelapa. Pemilihan pola mempertimbangkan efisiensi jarak tempuh, kesinambungan narasi (maritim – niaga -komunitas - religius), dan ketersediaan koridor pejalan.



Gambar 7. Hasil Deliniasi yang diterjemahkan dalam Peta Wisata Terpadu (Maritim – Niaga – Komunitas – Religi)

Untuk memastikan implementasi konsisten di lapangan, disiapkan peta wisata (lihat Gambar 7), sebagai media navigasi/wayfinding (kode visual, penanda rute, *vantage point*), dan booklet (lihat gambar 8), sebagai media interpretasi (narasi singkat, etiket kunjungan, highlight UMKM). Literatur menunjukkan bahwa desain interpretasi dan wayfinding yang baik meningkatkan kejelasan alur kunjungan serta kualitas pembelajaran pengunjung (Arthur & Passini, 2002; Ham, 2013), sementara standar jaringan pejalan yang ringkas, jelas, dan aman adalah prasyarat integrasi antarsitus (ITDP, 2017).



Gambar 8. Booklet Jelajah Wisata

Untuk memastikan akuntabilitas program, indikator capaian disusun sederhana dan terukur: peningkatan pemahaman pemangku kepentingan

pasca-sosialisasi; pertambahan panjang segmen rute pejalan kaki yang layak dan informatif; jumlah tur terpandu per bulan; lama tinggal rata-rata pengunjung; nilai transaksi UMKM di sepanjang rute; frekuensi kolaborasi antarsitus per kuartal; serta tingkat kepatuhan penandaan sesuai peta. Pada saat yang sama, pembahasan ini mengakui keterbatasan: cakupan pendampingan pada siklus awal masih berpusat pada satu mitra inti, durasi implementasi singkat, dan kebutuhan legalisasi delineasi pada tingkat kota untuk menjamin keberlanjutan.

Secara keseluruhan, bukti pada pelaksanaan PKM menunjukkan bahwa kombinasi delineasi telah disepakati, booklet dan peta wisata, yang sebelumnya tidak ada, sekarang sudah diberikan oleh tim PKM Trisakti kepada pengelola Kawasan dan Masyarakat, agar dapat digunakan secara langsung. Pada saat yang sama, pembahasan ini mengakui keterbatasan: cakupan pendampingan pada siklus awal masih berpusat pada satu mitra inti, durasi implementasi singkat, dan kebutuhan legalisasi delineasi pada tingkat kota untuk menjamin keberlanjutan. Diharapkan tahapan PKM ini dapat berlanjut, guna meningkatkan potensi Kawasan sebagai wisata bersejarah terpadu, baik potensi maritim, niaga, komunitas dan religi.

4 KESIMPULAN

PKM ini menunjukkan bahwa pendampingan partisipatif dan sosialisasi delineasi efektif sebagai langkah awal integrasi wisata cagar budaya pada Sub-Kawasan Pasar Ikan, Kota Tua Jakarta. Penetapan delineasi sebagai rujukan spasial bersama membantu menyamakan persepsi batas, struktur ruang, dan elemen kunci antarpengelola; sementara booklet dan peta wisata berfungsi sebagai instrumen interpretasi dan navigasi yang operasional di lapangan. Hasil lokakarya dan diskusi memperlihatkan penerimaan aktor kunci serta komitmen untuk memperluas koordinasi lintas-situs.

Temuan monitoring dan evaluasi partisipatif pada siklus pertama mengerucut pada tiga kebutuhan utama: (1) sosialisasi berkesinambungan agar delineasi dipakai seragam; (2) mekanisme koordinasi reguler untuk memastikan kesinambungan tindak lanjut; dan (3) perbaikan tata pemanfaatan lintas-situs terkait prioritas ruang, alur kunjungan, dan keterkaitan program. Dampak awal yang teridentifikasi adalah meningkatnya sense of belonging dan kesiapan berkolaborasi (terutama pada pengelola Museum Bahari), yang menjadi prasyarat implementasi terpadu.

Implikasi praktisnya, program berikut perlu menitikberatkan pada: legalisasi delineasi pada tingkat kota, penataan konektivitas pejalan pada koridor prioritas, standarisasi konten interpretasi antarsitus, serta penguatan kapasitas komunitas/UMKM di sepanjang rute. Indikator kinerja sederhana,

pemahaman pemangku kepentingan, panjang segmen rute wisata yang layak dan informatif, jumlah tur terpandu, lama tinggal pengunjung, transaksi UMKM, dan frekuensi kolaborasi, dapat dijalankan untuk memantau kemajuan secara periodik.

PKM ini masih memiliki keterbatasan pada cakupan mitra inti dan durasi implementasi awal. Meski demikian, rancangan kerja dan hasil awal menunjukkan model yang dapat direplikasi pada koridor wisata *heritage* lain di Jakarta. Kombinasi delineasi yang disepakati, instrumen interpretasi - navigasi, dan forum koordinasi reguler merupakan fondasi operasional bagi integrasi wisata cagar budaya yang berkelanjutan dan berkeadilan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Arthur, P., & Passini, R. (2002). *Wayfinding: People, signs, and architecture*. McGraw-Hill.

Ashworth, G. J., & Tunbridge, J. E. (2000). *The tourist-historic city: Retrospect and prospect of managing the heritage city*. Routledge/Pergamon.

Bandarin, F., & van Oers, R. (2012). *The Historic Urban Landscape: Managing heritage in an urban century*. Wiley-Blackwell.

Borrini-Feyerabend, G., Dudley, N., Jaeger, T., Lassen, B., Pathak Broome, N., Phillips, A., & Sandwith, T. (2013). *Governance of protected areas: From understanding to action*. IUCN.

Corsane, G., Davis, P., Elliott, S., Maggi, M., Murtas, D., & Rogers, S. (2005). Ecomuseum performance in Piemonte and Liguria, Italy: The role of community networks. *Museum and Society*, 3(3), 165–186.

Dovey, K., & Pafka, E. (2020). What is walkability? The urban DMA. *Urban Studies*, 57(1), 93–108. https://doi.org/10.1177/0042098018819727

Gehl, J. (2010). *Cities for people*. Island Press.

Ham, S. H. (2013). *Interpretation: Making a difference on purpose*. Fulcrum Publishing.

Indonesia.go.id. (2019). Portal Informasi Indonesia. https://indonesia.go.id/kategori/komoditas/1241/kronik-sejarah-kota-pelabuhan-sunda-kelapa; diakses pada Juli 2025

Jokilehto, J. (2011). *ICCROM and the conservation of cultural heritage: A history of the organization's first 50 years, 1959–2009*. ICCROM.

Kompas.com. (2019, October 9). *Kampung Akuarium bakal dibangun jadi kawasan wisata budaya*. https://megapolitan.kompas.com/read/2019/10/09/12591921/kampung-akuarium-bakal-dibangun-jadi-kawasan-wisata-budaya

Labadi, S. (2013). *UNESCO, cultural heritage, and outstanding universal value: Value-based analyses of the World Heritage and intangible cultural heritage conventions*. AltaMira Press.

Mitra Museum Jakarta. (2025). Sejarah Bangunan Museum Bahari. https://www.mitramuseumjakarta.id/bahari; diakses pada Juli 2025

Pangkerego, G. E. V. (2023). Biaya dan manfaat sosial penanganan permukiman kumuh di Kampung Akuarium, Jakarta Utara (Tesis Magister). Institut Teknologi Bandung.

Republik Indonesia. (2010). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya*. Kementerian Hukum dan HAM.

Timothy, D. J., & Boyd, S. W. (2003). *Heritage tourism*. Prentice Hall.

UNESCO. (2011). *Recommendation on the Historic Urban Landscape (HUL)*. UNESCO World Heritage Centre.

Wardhana, Arya. (2021). Jakarta: Sunda Kelapa dan Sejarah Jakarta. https://aryawardhana.id/2021/11/20/jakarta-sunda-kelapa-dan-sejarah-jakarta/; diakses pada Juli 2025